



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2023



DLH KABUPATEN PURWAKARTA

 Jl. Purnawarman Timur Nomor 11 A

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-nya dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran kegiatan pertahun yang telah disusun dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

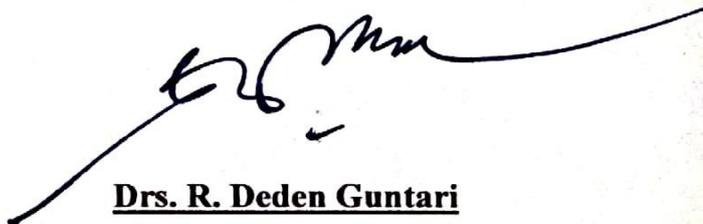
Materi Penyusunan Kegiatan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan kegiatan – kegiatan lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang ada di masing-masing bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, namun demikian diharapkan Program dan Kegiatan yang terkandung didalamnya dapat dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Kepada semua pihak yang telah turut berperan serta didalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami menyampaikan banyak terima kasih dan kami menyadari masih banyak kekurangan mengingat berbagai keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, kami berharap ada koreksi, kritik dan saran membangun demi kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Purwakarta, November 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWAKARTA**



Drs. R. Deden Guntari
NIP. 19640228 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	15
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup	19
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	40
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	46
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat	57
BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	59
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Lingkungan Hidup	62
3.3 Program dan Kegiatan	65
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	76
4.1 Program dan Kegiatan	76
BAB V PENUTUP	84

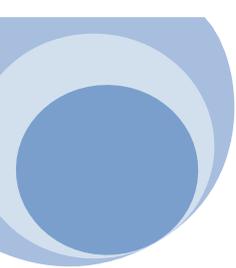
BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional dibangun secara makro oleh Pemerintah Pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD.

Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakartamelaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabuapten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, yang menyatakan bahwa visi Bupati Purwakarta adalah “**Mewujudkan *Purwakarta Istimewa***”. Dimana visi ini mempunyai makna adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontekstual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 sila dari Pancasila.

Sedangkan Misi Bupati Purwakarta tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- Misi :
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih Dan Profesional;.
 3. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan;
 4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa;.

Dari 4 (empat) Misi di atas, Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berada pada misi ke 3 (tiga) dengan tujuan dan sasarannya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
<p>Misi Ketiga :</p> <p><i>Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan..</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Pembangunan Insfrastuktur, Penaatan Ruang, Pengembangan Wilayah, dan Lingkungan Hidup. ➤ Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Inprastuktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah. ➤ Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup ➤ Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Purwakarta periode tahun 2018 - 2023 tersebut di atas, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **"MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"**.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aparatur yang peduli, taat dan profesional;
2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pengawasan & mengendalikan pencemaran serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan lingkungan hidup.

Dari ketiga Misi yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ini dapat diuraikan sebagai berikut ini :

Misi 1, yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang terampil, *capable* dan professional akan berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH yang optimal;

Misi 2, menjadikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi teknis yang mampu dan *credibel* memiliki kewenangan didaerah untuk mengelola sumber daya alam dan mengendalikan keutuhan lingkungan hidup hulu maupun hilir, fisik maupun sosial;

Misi 3, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup merupakan tupoksi dinas yang senantiasa dilakukan secara transparan dan professional serta mengikutkan peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup.

Dengan mengacu kepada visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tersebut di atas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018 – 2023, sehingga akan lebih fokus dan terarah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagaimana dimaksud diatas.

Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dibidangnya;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan;
3. Mengembalikan kondisi sumber air, sungai & danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah dan lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati;
4. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
6. Penegakkan hukum lingkungan.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk jangka waktu tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aparatur yang profesional & memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup;
2. Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi;
3. Meningkatkan perlindungan konservasi sumber daya alam & keanekaragaman hayati;
4. Meningkatkan pengamanan sumber mata air;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup;
6. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan;
7. Meningkatnya penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan.

Berdasarkan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas, bahwa pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu upaya terpadu untuk melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi kebijakan, perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan yang merupakan kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.

Permasalahan lingkungan hidup akhir – akhir ini menjadi salah satu isu utama di dunia. Isu *GLOBAL WARMING* atau pemanasan global, disinyalir menyebabkan mencairnya es di kutub dan terjadinya perubahan iklim serta hilangnya pulau – pulau kecil akibat naiknya permukaan air laut. Namun inti utama penyebab *GLOBAL WARMING* diakibatkan adanya peningkatan emisi gas – gas rumah kaca (CO_2 , CH_4 , Nox, dan SO_x) yang berasal dari kegiatan manusia.

Penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca ini berasal dari sektor perindustrian, transportasi dan limbah yang dihasilkan oleh manusia selain akibat polusi oleh alam (mis ; gunung berapi dsb).

Degradasi lingkungan memang sangat pelik dan merupakan masalah yang sangat kompleks untuk diselesaikan. Terutama di Indonesia permasalahan lingkungan hidup meliputi banyak hal, dimulai dari tingginya laju peningkatan penduduk yang berimbas pada banyak nya lahan – lahan hijau yang beralih fungsi menjadi permukiman, menurunnya kualitas udara di kota – kota besar, pencemaran akibat limbah industri dan domestik, penanganan pengelolaan sampah yang tidak profesional, penurunan kualitas tanah karena pencemaran, banyaknya lahan kritis, *deforestasi* hutan, krisis air bersih, krisis sumber daya energi (minyak bumi, batubara dsb) yang semakin menipis, pola perilaku manusia yang tidak berwawasan lingkungan serta banyaknya kebijakan – kebijakan baik di pusat maupun di daerah yang tidak *pro* terhadap lingkungan sebagai salah satu penyumbang sebagian masalah lingkungan hidup yang cukup kompleks di Indonesia.

Secara umum kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta relatif masih cukup baik, namun dalam perkembangannya pembangunan dan peningkatan penduduk yang terus bertambah menyebabkan tekanan terhadap kerusakan Lingkungan Hidup cukup nyata di Purwakarta. Bertambahnya jumlah penduduk merupakan faktor utama yang memicu terjadinya perubahan lingkungan, sebagian besar pertambahan penduduk di Kabupaten Purwakarta berasal dari warga pendatang yang mencari pekerjaan di Purwakarta. Banyaknya industri menjadi daya tarik tersendiri bagi warga pendatang untuk datang ke Kabupaten Purwakarta. Dampak peningkatan jumlah penduduk di Purwakarta menyebabkan lahan – lahan pertanian dan ruang terbuka hijau banyak yang beralih fungsi menjadi permukiman, kemudian pertambahan jumlah sampah domestik yang dihasilkan ikut mencemari lingkungan, dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi yang digunakan ikut pula menambah pencemaran udara di Kabupaten Purwakarta selain polusi dari cerobong industri.

Upaya untuk menangani persoalan Lingkungan Hidup tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua instansi saja, melainkan membutuhkan adanya keterpaduan dan koodinasi antar instansi melalui langkah-langkah koordinasi yang baik bahkan kalangan swasta dan masyarakat pun sangat dibutuhkan peran dan kesadarannya untuk mengantisipasi semakin kompleksnya permasalahan lingkungan hidup yang ada pada saat ini.

Jika melihat letaknya, Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107°30' – 107°40' Bujur Timur dan 6°25' – 6°45' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Karawang dan Kab. Subang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; dan

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektar, atau 971,72 km². Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 Desa dan 9 Kelurahan, 524 Dusun, 1.152 Rukun Warga (RW), dan 3.244 Rukun Tetangga (RT), seperti yang tergambar dalam Tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta

KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA /KELURAHAN
	KM ²	%	
1	2	3	4
1. Jatiluhur	60,11	6,19	10
2. Sukasari	92,01	9,47	5
3. Maniis	71,64	7,37	8
4. Tegalwaru	73,23	7,54	13
5. Plered	31,48	3,24	16
6. Sukatani	95,43	9,82	14
7. Darangdan	67,39	6,94	15
8. Bojong	68,69	7,07	14
9. Wanayasa	56,55	5,82	15
10. Kiarapedes	52,16	5,37	10
11. Pasawahan	36,96	3,80	12
12. Pondoksalam	44,08	4,54	11
13. Purwakarta	24,83	2,56	10
14. Babakancikao	42,40	4,36	9
15. Campaka	43,60	4,49	10
16. Cibatu	54,66	5,63	10
17. Bungursari	56,50	5,81	10
JUMLAH	971,72	100,00	192

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dilihat dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu :

a. Wilayah Pegunungan

Wilayah ini terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100 – 2.036 meter di atas permukaan laut dan meliputi 29,73 persen dari total luas wilayah;

b. Wilayah Perbukitan

Wilayah ini terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500 – 1.100 meter di atas permukaan laut dan meliputi 33,80 persen dari total luas wilayah;

c. Wilayah Dataran

Wilayah ini terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35 - 499 meter di atas permukaan laut dan meliputi 36,47 persen dari total luas wilayah.

Gambaran umum demografis wilayah Kabupaten Purwakarta, tercermin dari jumlah penduduk Purwakarta, pada tahun 2020 berdasarkan data hasil Sensus Penduduk tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 997.869 jiwa. Dikarenakan Sensus Penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali (tahun berakhir 0), maka untuk tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta menggunakan data proyeksi. Data penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2022 mencapai 1.020.994 jiwa (Jumlah penduduk menggunakan data kependudukan semester 2 tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Hal ini disebabkan selain akibat faktor pertumbuhan penduduk alami, juga dipengaruhi oleh faktor migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar.

Dengan pengertian tersebut diatas, jelas bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tanggung jawab semua pihak, yang meliputi subjek pengelola, penata dan semua unsur serta komponen objek Pengelolaan dan Penataan Lingkungan Hidup.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan – peraturan yang melandasi disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
34. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
35. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
36. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 Rencana Kerja Perangkat Daerah;
37. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan yang memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan program - programnya dan juga keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta selama periode 1 (satu) tahun, yang disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) DLH Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 sehingga perencanaan tersebut dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang lingkungan hidup dengan mendeskripsikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya yang dimulai dari perencanaan hingga penganggaran, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan yang direncanakan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan SKPD, proses penyusunan Renja Perubahan SKPD, keterkaitan antara Renja Perubahan SKPD dengan dokumen RKP, Renstra SKPD, dengan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian /realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaanindikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik.

BAB IV PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, dan pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2024, serta progress pencapaian kinerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program dan kegiatannya.

Rencana kerja perubahan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan juga merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja

ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mendapat alokasi Anggaran Murni sebesar Rp. 42.373.674.933 kemudian mengalami Pergeseran Anggaran Parsial II menjadi Rp. 42.303.674.933,- dengan 9 Program , 18 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut Anggaran Belanja Operasional tersebut telah teralisasi sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp. 18.959.069.938,- (44,82 %). Capaian hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.1** berikut dibawah ini :

Tabel 2.1
Matriks Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Kode							Perangkat daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Murni Tahun 2023 (Sesuai DPA)			Realisasi (Triwulan I)			Sisa		Perangkat Daerah
									Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	Pagu	%	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	05	01					Dinas Lingkungan Hidup			42.373.674.933			18.959.069.938	23.414.604.995	55,18 %		
2	11	01	2				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA										
2	11	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
2	11	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	1 Dokumen Renja Mumi 1 Dokumen Renja Perubahan	30.991.800	Purwakarta	-	0	30.991.800	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwakarta	1 Dokumen RKA SKPD	14.651.700	Purwakarta	1 Dokumen RKA SKPD	10.800.000	3.851.700	26,29 %	Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	01	2	01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Purwakarta	1 Dokumen Perubahan RKA SKPD	10.810.000	Purwakarta	-	0	10.810.000	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Purwakarta	1 Dokumen DPA SKPD	9.938.100	Purwakarta	1 Dokumen DPA SKPD	6.660.000	3.278.100	32,99 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA SKPD	Purwakarta	1 Dokumen Perubahan DPA SKPD	9.927.000	Purwakarta	-	0	9.927.000	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	1 Laporan LAKIP	14.900.200	Purwakarta	1 Laporan LAKIP	10.800.000	4.100.200	27,52 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	1 Laporan LPPD	19.926.200	Purwakarta	-	0	19.926.200	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	03			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2	11	01	2	03	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	14 Bulan 130 Orang	13.394.408.759	Purwakarta	3 Bulan	2.573.519.796	10.820.888.963	80,79 %	Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	01	2	02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purwakarta	4 Dokumen	14.996.200	Purwakarta	1 Dokumen	2.400.000	12.596.200	84 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	1 Laporan	14.999.900	Purwakarta	1 Laporan	4.983.100	10.016.800	66,78 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
2	11	01	2	03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	4 Dokumen	15.000.000	Purwakarta	-	0	15.000.000	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
2	11	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	1 Paket Jas Hujan 1 Paket Sepatu Boots 2 Paket Pakaian Petugas Kebersihan	575.000.000	Purwakarta	Jas Hujan 405 Stel, Sepatu Boots 405 Pasang, Pakaian Petugas Kebersihan 810 Stel	567.000.000	8.000.000	1,39 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Purwakarta	128 Orang	50.000.000	Purwakarta	2 Orang	2.060.000	47.940.000	95,88 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah										

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Purwakarta	1 Paket	34.999.400	Purwakarta	-	0	34.999.400	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Purwakarta	1 Paket	44.998.800	Purwakarta	1 Paket	4.967.900	40.030.900	88,96 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Purwakarta	1 Paket	5.286.132.812	Purwakarta	Pertalite 11.544.665 liter Solar 118.445 Liter Dexlite 16.107 Liter	1.255.788.300	4.030.344.512	76,24 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Purwakarta	6 Paket	50.000.000	Purwakarta	5 paket	36.220.000	13.780.000	27,56 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	12 Laporan	25.000.000	Purwakarta	2 Laporan	2.100.000	22.900.000	91,60 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	12 Laporan	74.600.000	Purwakarta	3 Laporan	6.855.510	67.744.490	90,81 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
2	11	01	2	07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Purwakarta	29 Unit	30.000.000	Purwakarta	-	0	30.000.000	100 %	Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	01	2	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Purwakarta	1 Unit Printer 2 Unit Face Detector 3 Unit Exhaust Fan 3 Unit Laptop 5 Unit PC All In	200.000.000	Purwakarta	-	0	200.000.000	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2	11	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	12 Laporan	5.000.000	Purwakarta	2 Laporan	1.000.000	4.000.000	80 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Purwakarta	12 Laporan	249.973.584	Purwakarta	3 Laporan	37.856.992	212.116.592	84,86 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Purwakarta	1 Laporan Kegiatan Hari Jadi Purwakarta 12 Laporan	11.725.232.304	Purwakarta	2 Laporan	11.725.232.304	1.823.940.492	84,44 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2	11	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Purwakarta	10 Unit	100.000.000	Purwakarta	2 Unit	23.627.100	76.372.900	76,37 %	Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

								Dibayarkan Pajaknya											
2	11	01	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purwakarta	1 Unit Rekondisi Mobil Toilet 40 Unit, Pengurusan izin dan/atau Pajak 64 Unit Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan	1.950.000.000	Purwakarta	64 Unit kendaraan operasional yang terpelihara	830.833.994	1.119.166.006	57,39 %	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Purwakarta	1 Unit	125.471.985	Purwakarta	-	0	125.471.985	100 %	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	01	2	09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Purwakarta	3 Unit	430.170.000	Purwakarta	3 Unit	382.254.000	47.916.000	88,86 %	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	02					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												
2	11	02	2	01			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota												
2	11	01	2	01	01		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota yang Disusun	Purwakarta	5 Dokumen	100.000.000	Purwakarta	Hanya dicairkan untuk spdp saja dalam rangka penunjang penyusunan dan penetapan dokumen	3.459.000	96.541.000	96,54 %	Dinas Lingkungan Hidup		

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

								sector Lingkungan hidup yang dilaksanakan								emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim					
2	11	03	2	01	03			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Purwakarta	7 Dokumen	682.397.289	Purwakarta	1 Dokumen	41.550.000	640.847.289	93,91 %	Dinas Lingkungan Hidup			
2	11	04	2	02				Penanggulangan Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten													
2	11	04	2	02	01			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Purwakarta	1 Laporan	75.000.000	Purwakarta	-	0	75.000.000	100 %	Dinas Lingkungan Hidup			
2	11	05						PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													
2	11	05	2	01				Penyimpanan Sementara Limbah B3													
2	11	05	2	01	02			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan	Purwakarta	1 Laporan	50.000.000	Purwakarta	-	0	50.000.000	100 %	Dinas Lingkungan Hidup			

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

								Diberikan											
2	11	06	2	01	03			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungs, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	60 Laporan	50.000.000	Purwakarta	-	8.900.500	41.099.500	82,20 %	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	06	2	01	04			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD Jumlah Dokuem Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Purwakarta	1 Dokumen Pengawasan dan Pembinaan 1 Dokumen Verifikasi Pengaduan	100.000.000	Purwakarta	-	8.040.000	91.960.000	91,96 %	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	08						PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
2	11	08	2	01				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	08	2	01	02		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Purwakarta	1 Dokumen Pembinaan Sekolah Adiwiyata 1 Dokumen Sosialisasi	250.000.000	Purwakarta	-	32.229.000	217.771.000	87,11 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	2	01	03		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Purwakarta	50 Orang	50.000.000	Purwakarta	-	0	50.000.000	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										
2	11	09	2	01			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2	11	09	2	01	01		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Purwakarta	20 Entitas	75.000.000	Purwakarta	-	0	75.000.000	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	10	2	01			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota										
2	11	10	2	01	01		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Purwakarta	1 Dokumen	50.000.000	Purwakarta	-	5.030.000	44.970.000	89,94 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										
2	11	11	2	01			Pengelolaan Sampah										
2	11	11	2	01	02		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Purwakarta	4 Laporan	399.641.600	Purwakarta	1 Laporan	140.437.000	259.204.600	64,86 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2	01	03		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Purwakarta	64907 Ton	4.200.000.000	Purwakarta	9.736.05 Ton	99.612.500	4.100.387.500	97,63 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2	01	04		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya Yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Purwakarta	3 Kelompok	439.000.000	Purwakarta	-	0	439.000.000	100 %	Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	11	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat,Provinsi maupun pihak Lain di Luar Kabupaten /Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Purwakarta	3 Dokumm	325.358.400	Purwakarta	1 Dokumen	199.768.000	125.590.400	38,60 %	Dinas Lingkungan Hidup
---	----	----	---	----	----	---	---	------------	----------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------------------------

Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Kode							Perangkat daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Murni Tahun 2023 (Sesuai DPA)			Parsial II Tahun 2023			Selisih		Perangkat Daerah
									Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	Pagu	%	
1							2	3	4	5	6						
2	05	01					Dinas Lingkungan Hidup			42.373.674.933			42.303.674.933	70.000.000	0,17 %		
2	11	01	2				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			34.507.129.644			34.507.129.644				
2	11	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			111.145.900			111.145.900				
2	11	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	1 Dokumen Renja Mumi 1 Dokumen Renja Perubahan	30.991.800	Purwakarta	1 Dokumen Renja Mumi 1 Dokumen Renja Perubahan	30.991.800	-		DLH
2	11	01	2	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwakarta	1 Dokumen RKA SKPD	14.651.700	Purwakarta	1 Dokumen RKA SKPD	14.651.700	-		DLH

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	01	2	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Purwakarta	1 Dokumen Perubahan RKA SKPD	10.810.000	Purwakarta	1 Dokumen Perubahan RKA SKPD	10.810.000	-		DLH
2	11	01	2	01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Purwakarta	1 Dokumen DPA SKPD	9.938.100	Purwakarta	1 Dokumen DPA SKPD	9.938.100	-		DLH
2	11	01	2	01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA SKPD	Purwakarta	1 Dokumen Perubahan DPA SKPD	9.927.900	Purwakarta	1 Dokumen Perubahan DPA SKPD	9.927.900	-		DLH
2	11	01	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	1 Laporan LAKIP	14.900.200	Purwakarta	1 Laporan LAKIP	14.900.200	-		DLH
2	11	01	2	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	1 Laporan LPPD	19.926.200	Purwakarta	1 Laporan LPPD	19.926.200	-		DLH
2	11	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.424.404.859			13.424.404.859			
2	11	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	14 Bulan 130 Orang	13.394.408.759	Purwakarta	14 Bulan 130 Orang	13.394.408.759	-		DLH
2	11	01	2	02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purwakarta	4 Dokumen	14.996.200	Purwakarta	4 Dokumen	14.996.200	-		DLH
2	11	01	2	02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Purwakarta	1 Laporan	14.999.900	Purwakarta	1 Laporan	14.999.900	-		DLH

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

						Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
2	11	01	2	03	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000.000				15.000.000			
2	11	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	4 Dokumen	15.000.000	Purwakarta	4 Dokumen	15.000.000	-			DLH
2	11	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				625.000.000				625.000.000			
2	11	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	1 Paket Jas Hujan 1 Paket Sepatu Boots 2 Paket Pakaian Petugas Kebersihan	575.000.000	Purwakarta	1 Paket Jas Hujan 1 Paket Sepatu Boots 2 Paket Pakaian Petugas Kebersihan	575.000.000	-			DLH
2	11	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Purwakarta	128 Orang	50.000.000	Purwakarta	128 Orang	50.000.000	-			DLH
2	11	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.515.731.012				5.515.731.012			
2	11	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Purwakarta	1 Paket	34.999.400	Purwakarta	1 Paket	34.999.400	-			DLH
2	11	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Purwakarta	1 Paket	44.998.800	Purwakarta	1 Paket	44.998.800	-			DLH

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Purwakarta	1 Paket	5.286.132.812	Purwakarta	1 Paket	5.286.132.812	-		DLH
2	11	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Purwakarta	6 Paket	50.000.000	Purwakarta	6 Paket	50.000.000	-		DLH
2	11	01	2	06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	12 Laporan	25.000.000	Purwakarta	12 Laporan	25.000.000	-		DLH
2	11	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	12 Laporan	74.600.000	Purwakarta	12 Laporan	74.600.000	-		DLH
2	11	01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				230.000.000			230.000.000			
2	11	01	2	07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Purwakarta	29 Unit	30.000.000	Purwakarta	29 Unit	30.000.000	-		DLH
2	11	01	2	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Purwakarta	1 Unit Printer 2 Unit Face Detector 3 Unit Exhaust Fan 3 Unit Laptop 5 Unit PC All In	200.000.000	Purwakarta	1 Unit Printer 2 Unit Face Detector 3 Unit Exhaust Fan 3 Unit Laptop 5 Unit PC All In	200.000.000	-		DLH
2	11	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.980.205.888			11.980.205.888			
2	11	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	12 Laporan	5.000.000	Purwakarta	12 Laporan	5.000.000	-		DLH

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Purwakarta	12 Laporan	249.973.584	Purwakarta	12 Laporan	249.973.584	-		DLH
2	11	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Purwakarta	1 Laporan Kegiatan Hari Jadi Purwakarta 12 Laporan	11.725.232.304	Purwakarta	1 Laporan Kegiatan Hari Jadi Purwakarta 12 Laporan	11.725.232.304	-		DLH
2	11	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.605.641.985			2.605.641.985			
2	11	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Purwakarta	10 Unit	100.000.000	Purwakarta	10 Unit	100.000.000	-		DLH
2	11	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purwakarta	1 Unit Rekondisi Mobil Toilet 40 Unit, Pengurusan izin dan/atau Pajak 64 Unit Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan	1.950.000.000	Purwakarta	1 Unit Rekondisi Mobil Toilet 40 Unit, Pengurusan izin dan/atau Pajak 64 Unit Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan	1.950.000.000	-		DLH
2	11	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Purwakarta	1 Unit	125.471.985	Purwakarta	1 Unit	125.471.985	-		DLH

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	01	2	09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Purwakarta	3 Unit	430.170.000	Purwakarta	3 Unit	430.170.000	-		DLH
2	11	02					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				400.000.000			400.000.000			
2	11	02	2	01			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				400.000.000			400.000.000			
2	11	01	2	1			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota yang Disusun	Purwakarta	5 Dokumen	100.000.000	Purwakarta	5 Dokumen	100.000.000	-		DLH
2	11	01	2	02			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaah Kebijakan yang telah Mengakomidir RPPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	5 Dokumen	300.000.000	Purwakarta	5 Dokumen	300.000.000	-		DLH
2	11	03					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.202.545.289			1.157.545.289			
2	11	03	2	01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.127.545.289			1.082.545.289			
2	11	03	2	01	01		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	Jumlah dokumen uji kualitas Lingkungan hidup dilaksanakana terhadap media air, tanah , udara dan laut	Purwakarta	90 Dokumen	100.000.000	Purwakarta	90 Dokumen	100.000.000	-		DLH

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	03	2	01	01		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas Lingkungan hidup dilaksanakana terhadap media air, tanah , udara dan laut	Purwakarta	44 Dokumen	175.000.000	Purwakarta	44 Dokumen	150.000.000	25.000.000	14,29 %	DLH
2	11	03	2	01	02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dan sector Lingkungan hidup yang dilaksanakan	Purwakarta	3 Dokumen Proklam, 2 Dokumen Cator	170.148.000	Purwakarta	3 Dokumen Proklam, 2 Dokumen Cator	150.148.000	20.000.000	11,76 %	DLH
2	11	03	2	01	03		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Purwakarta	7 Dokumen	682.397.289	Purwakarta	7 Dokumen	682.397.289	-		DLH
2	11	04	2	01			Penanggulangan Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten				75.000.000			75.000.000			
2	11	04	2	01	01		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Purwakarta	1 Laporan	75.000.000	Purwakarta	1 Laporan	75.000.000	-		DLH
2	11	05					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				150.000.000			150.000.000			

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	05	2	01			Penyimpanan Sementara Limbah B3			50.000.000			50.000.000				
2	11	05	2	01	02		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Purwakarta	1 Laporan	50.000.000	Purwakarta	1 Laporan	50.000.000	-		DLH
2	11	05	2	02			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000			100.000.000				
2	11	2	02	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang sesuai dengan Kewenangannya	Purwakarta	1 Laporan	100.000.000	Purwakarta	1 Laporan	100.000.000	-		DLH
2	11	06					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			300.000.000			300.000.000				
2	11	06	2	01			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH			300.000.000			300.000.000				

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	08	2	01	02		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Purwakarta	1 Dokumen Pembinaan Sekolah Adiwiyata 1 Dokumen Sosialisasi	250.000.000	Purwakarta	1 Dokumen Pembinaan Sekolah Adiwiyata 1 Dokumen Sosialisasi	250.000.000	-		DLH
2	11	08	2	01	03		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Purwakarta	50 Orang	50.000.000	Purwakarta	50 Orang	50.000.000	-		DLH
2	11	09					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				100.000.000			75.000.000			
2	11	09	2	01			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000			75.000.000			
2	11	09	2	01	01		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Purwakarta	20 Entitas	100.000.000	Purwakarta	20 Entitas	75.000.000	25.000.000	25 %	DLH
2	11	10					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				50.000.000			50.000.000			
2	11	10	2	01			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				50.000.000			50.000.000			

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

2	11	10	2	01	01		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Purwakarta	1 Dokumen	50.000.000	Purwakarta	1 Dokumen	50.000.000	-		DLH
2	11	11					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				5.364.000.000			5.364.000.000			
2	11	11	2	01			Pengelolaan Sampah				5.364.000.000			5.364.000.000			
2	11	11	2	01	02		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Purwakarta	4 Laporan	399.641.600	Purwakarta	4 Laporan	399.641.600	-		DLH
2	11	11	2	01	03		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah,Dikumpulkan,Di angkut,Diolah Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Purwakarta	64907 Ton	4.200.000.000	Purwakarta	64907 Ton	4.200.000.000	-		DLH
2	11	11	2	01	04		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya Yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Purwakarta	3 Kelompok	439.000.000	Purwakarta	3 Kelompok	439.000.000	-		DLH
2	11	11	2	01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat,Provinsi maupun pihak Lain di Luar Kabupaten /Kota untuk Pengelolaan Sampah	Purwakarta	3 Dokumrn	325.358.400	Purwakarta	3 Dokumrn	325.358.400	-		DLH

Pada pencapaian pelaksanaan Capaian Kinerja Tahun 2023 , semua Program dan Kegiatan belum teralisasi secara maksimal dalam laporan triwulan 2.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mendapat alokasi Anggaran Parsial II sebesar Rp. 42.303.674.933,- dengan 9 Program , 18 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut Anggaran Belanja Operasional tersebut telah teralisasi sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp. 18.959.069.938,- (44,82 %)

Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2024 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Periode 2018 - 2023, dikarenakan Rencana Kerja Perubahan 2023 masih dalam tahun berjalan.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya adalah kewenangan urusan wajib yang harus dikelola daerah Kabupaten/Kota yaitu salah satunya Urusan di Bidang Lingkungan Hidup, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016, dimana salah satu isinya adalah pembentukan lembaga teknis yang mengurus pengelolaan lingkungan hidup di daerah yaitu berbentuk Dinas Lingkungan Hidup.

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Purwakarta di Dinas Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi kepada lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;

- c. Perumusan bahan kebijakan Bupati di bidang lingkungan hidup;
- d. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional di bidang pencegahan lingkungan hidup;
- e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengendalian lingkungan hidup;
- f. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional dibidang konservasi sumberdaya alam;
- g. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional dibidang informasi dan kemitraan lingkungan;
- h. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis administratif yang meliputi program, keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
- i. Pembinaan terhadap unit pelayanan teknis badan dalam lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) orang pegawai yang berstatus PNS dengan berlatar belakang pendidikan dan bidang yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Data Pegawai Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	2	3
1	Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan : 1. SD 2. SMP 3. SMA 4. Sarjana Muda (D1 – D3) 5. S 1 dan D 4 6. S 2	28 23 51 - 17 12
	Jumlah	131 Orang
2	Pegawai berdasarkan pangkat/golongan : 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV	25 56 38 12
	Jumlah	131 orang
3	Pegawai berdasarkan jabatan : 1. Eselon II 2. Eselon III 3. Eselon IV 4. Eselon V 5. Staf	1 5 17 - 108
	Jumlah	131 orang
4	1. Pegawai Tenaga Tetap 2. Pegawai Tenaga Harian Lepas	52 338 -
	Jumlah	521 orang

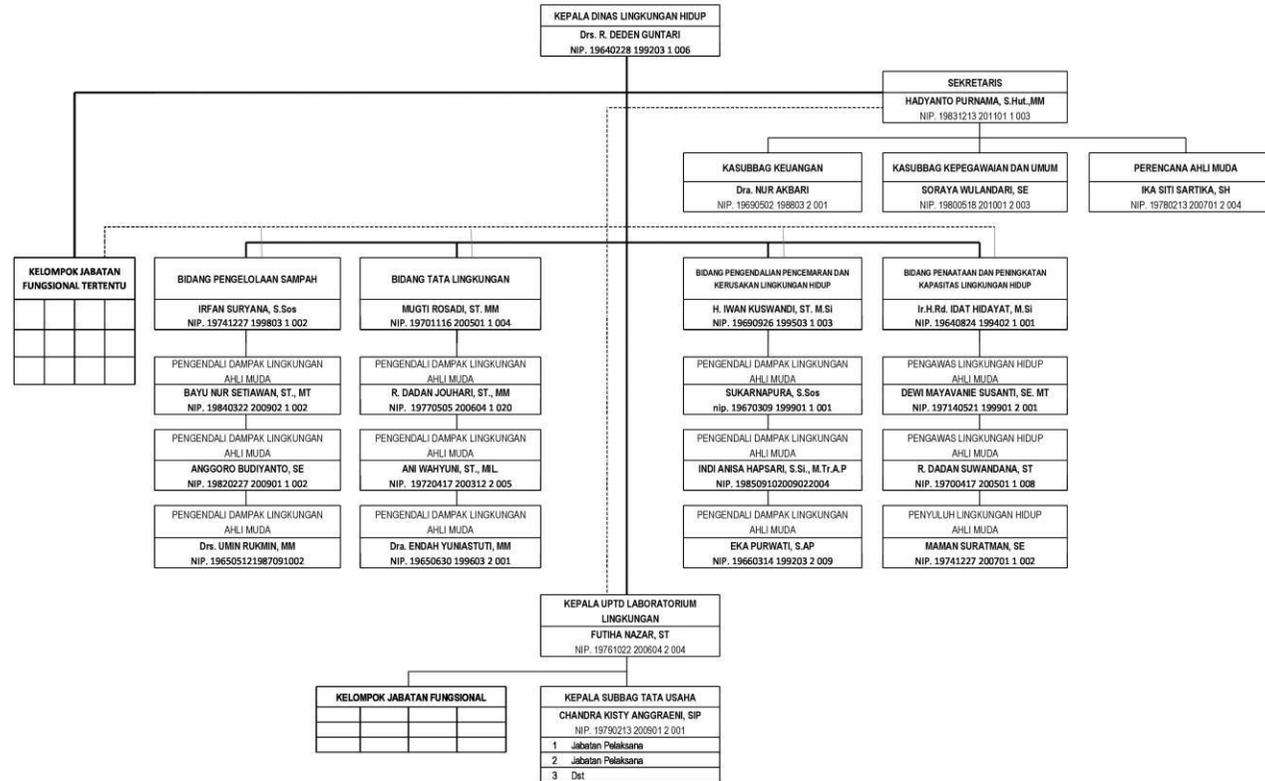
Sumber : Bagian Kepegawaian

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat dan Susunan dan Peraturan Bupati 165 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Struktur Organisasi Badan Lingkungan hidup terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - ❖ Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - ❖ Sub Bagian Keuangan;
 - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 - ❖ Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - ❖ Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - ❖ Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 - ❖ Seksi Penanganan Sampah
 - ❖ Seksi Penanganan Kebersihan;
 - ❖ Seksi Penerimaan Retribusi dan Penyedotan Tinja.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - ❖ Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - ❖ Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - ❖ Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
 - ❖ Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - ❖ Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - ❖ Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
7. UPTD Laboratorium
8. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA

Sesuai Peraturan Bupati Purwakarta
Nomor : 236 Tahun 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta



Selain tugas pokok di atas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi pelayanan pada masyarakat yang didasari atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang kemudian di dukung dengan Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Walau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Bab IV Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa urusan lingkungan hidup termasuk salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, tetapi hal tersebut bukan menjadi halangan atau hambatan dalam memberikan pelayanan dibidang Lingkungan Hidup kepada masyarakat, karena pelayanan bidang lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal demi terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Pelayanan bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan. Adapun fungsi pelayanan yang di maksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Pencemaran Air;
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak bergerak;
3. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa;
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan hidup.

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PURWAKARTA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<i>SPM Permen LH No.19 tahun 2008</i>												
1	% jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	-	100%	100 titik	120 titik	120 titik	150 titik	89 titik	100 titik	120 titik		
	% jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	-	100%	20 titik	30 titik	30 titik	50 titik	20 titik	20 titik	30 titik		
	% luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomasa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	-	100%	2 lok/titik	2 lok/titik	2 lok/titik	2 lok/titik	-	2 lok/titik	2 lok/titik		
	% jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang di Tindaklanjuti	90%	-	90%	65%	80%	85%	90%	105,9%	85%	90%		

Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tetap mempertimbangkan isu – isu penting sebagai bentuk tantangan kedepannya terhadap perkembangan Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana.

Selain itu penentuan isu – isu penting / strategis harus didasarkan pada realitas dan kondisi saat ini dan masa yang akan datang, dimana setiap perubahan yang terjadi akibat kegiatan manusia akan selalu berdampak pada kualitas lingkungan hidup. Perubahan ini akan menjadi isu penting/strategis yang harus dicari solusinya. Beberapa faktor terkait hal tersebut adalah :

a. Faktor Internal :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat menjembatani antara Perusahaan dan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup sehingga apa yang diinginkan oleh berbagai pihak dapat dilaksanakan dengan baik dan terencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur

Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan mengikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan maupun teknis lainnya.

3. Sarana dan Prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana terus dilakukan dalam upaya tuntutan tugas ke depannya dalam mendukung manajemen pengelolaan bidang lingkungan hidup yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

4. Anggaran

Peningkatan Anggaran Bidang Lingkungan Hidup yang tidak terlalu signifikan yang diberikan oleh APBD mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup.

b. Faktor Eksternal :

1. Globalisasi

Perkembangan Kemajuan Teknologi dan Industri di era globalisasi ini, menuntut Pemerintah Daerah mengikuti perkembangan teknologi agar aparatur dapat bersaing tinggi dan dituntut untuk memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang sejajar. Pertumbuhan industri yang maju juga berdampak pada lingkungan hidup disekitarnya, bisa mengakibatkan global warming yang mempengaruhi udara ambient. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta dituntut untuk siap menghadapi segala permasalahan lingkungan hidup pada era globalisasi ini.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Penegakan peraturan perundang – undangan dibidang lingkungan hidup harus benar – benar dilaksanakan agar adanya efek jera terhadap usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran baik udara, tanah maupun air. Disatu pihak Dinas Lingkungan Hidup harus sebagai *Stakeholder* di Bidang Lingkungan Hidup dituntut untuk menerapkan peraturan perundang-undangan ini secara baik dan tegas.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purwakarta, yang mana sampai dengan saat Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini disusun belum diterbitkan, sehingga kami tidak dapat melakukan *review* atas RKPD 2023.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

Adapun Rencana Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk tahun 2023 secara keseluruhan disajikan pada uraian berikut ini :

Uraian Indikatif Program Rencana Kinerja DLH Tahun 2023

Program yang ada di bidang Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH;
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
9. Program Pengelolaan Persampahan.

Rencana Indikatif Kegiatan Tahun 2023

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023	Anggaran Parsial 1	Anggaran Parsial 2
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 111.145.900	Rp. 111.145.900	Rp. 111.145.900

	Sub Kegiatan :			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 30.991.800	Rp. 30.991.800	Rp. 30.991.800
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 14.651.700	Rp. 14.651.700	Rp. 14.651.700
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 10.810.000	Rp. 10.810.000	Rp. 10.810.000
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 9.938.100	Rp. 9.938.100	Rp. 9.938.100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 9.927.900	Rp. 9.927.900	Rp. 9.927.900
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi	Rp. 14.900.200	Rp. 14.900.200	Rp. 14.900.200
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 19.926.200	Rp. 19.926.200	Rp. 19.926.200
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 13.424.404.859	Rp. 13.424.404.859	Rp. 13.424.404.859
	Sub Kegiatan :			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 13.394.408.759	Rp. 13.394.408.759	Rp. 13.394.408.759
2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Rp. 14.996.200	Rp. 14.996.200	Rp. 14.996.200
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 14.999.900	Rp. 14.999.900	Rp. 14.999.900
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	Sub Kegiatan :			
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 625.000.000	Rp. 625.000.000	Rp. 625.000.000
	Sub Kegiatan :			
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 575.000.000	Rp. 575.000.000	Rp. 575.000.000
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 5.515.731.012	Rp. 5.515.731.012	Rp. 5.515.731.012
	Sub Kegiatan :			
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 34.999.400	Rp. 34.999.400	Rp. 34.999.400
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 44.998.800	Rp. 44.998.800	Rp. 44.998.800
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 5.286.132.812	Rp. 5.286.132.812	Rp. 5.286.132.812
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 74.600.000	Rp. 74.600.000	Rp. 74.600.000

	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 230.000.000	Rp. 230.000.000	Rp. 230.000.000
1.	Pengadaan Mebel	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 11.980.205.888	Rp. 11.980.205.888	Rp. 11.980.205.888
	Sub Kegiatan :			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 249.973.584	Rp. 249.973.584	Rp. 249.973.584
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 11.725.232.304	Rp. 11.725.232.304	Rp. 11.725.232.304
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Rp. 2.605.641.985	Rp. 2.605.641.985	Rp. 2.605.641.985
	Sub Kegiatan :			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.950.000.000	Rp. 1.950.000.000	Rp. 1.950.000.000
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 125.471.985	Rp. 125.471.985	Rp. 125.471.985
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 430.170.000	Rp. 430.170.000	Rp. 430.170.000

➤ **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023	Anggaran Parsial 1	Anggaran Parsial 2
	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000
	Sub Kegiatan :			
1.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
2.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000

➤ **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023	Anggaran Parsial 1	Anggaran Parsial 2
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.127.545.289	Rp. 1.082.545.289	Rp. 1.082.545.289
	Sub Kegiatan :			
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan thd Media Tanah, Air, Udara dan Laut (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan thd Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Rp. 175.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 170.148.000	Rp. 150.148.000	Rp. 150.148.000
4.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 682.397.289	Rp. 682.397.289	Rp. 682.397.289
	Kegiatan : Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
1.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000

➤ **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023	Anggaran Parsial 1	Anggaran Parsial 2
	Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	Sub Kegiatan :			
1.	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023	Anggaran Parsial 1	Anggaran Parsial 2
	Kegiatan : Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Sub Kegiatan :			
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau penimbunan	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000

➤ **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023	Anggaran Parsial 1	Anggaran Parsial 2
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemda Kab/Kota	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
	Sub Kegiatan :			
1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
2.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000

	Daerah Kabupaten/Kota			
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000

➤ **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023	Anggaran Parsial 1	Anggaran Parsial 2
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
	Sub Kegiatan :			
1.	Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup	Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000
2.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000

➤ **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023	Anggaran Parsial 1	Anggaran Parsial 2
	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Daerah	Rp. 100.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
	Sub Kegiatan :			
1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Rp. 100.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000

➤ **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023	Anggaran Parsial 1	Anggaran Parsial 2
	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	Sub Kegiatan :			
1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000

➤ **Program Pengelolaan Sampah**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023	Anggaran Parsial 1	Anggaran Parsial 2
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Rp. 5.364.000.000	Rp. 5.364.000.000	Rp. 5.364.000.000
	Sub Kegiatan :			
1.	Penanganan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	Rp. 399.641.600	Rp. 399.641.600	Rp. 399.641.600
2.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp. 4.200.000.000	Rp. 4.200.000.000	Rp. 4.200.000.000
3.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp. 439.000.000	Rp. 439.000.000	Rp. 439.000.000
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Rp. 325.358.400	Rp. 325.358.400	Rp. 325.358.400

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Periode 2018 – 2023, dimana Renstra dibuat sebagai upaya memberikan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023, khususnya yang terkait dengan pembangunan dibidang Lingkungan Hidup yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam penyusunan usulan rencana kegiatan tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

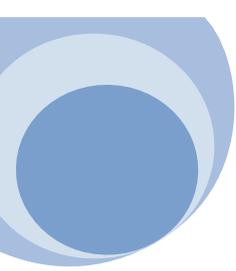
Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang, dan diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara terencana, sistematis, mengandung nilai, bobot dan mampu mendorong serta memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2023 dalam penyusunan Rencana dan Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Purwakarta pada umumnya.

Setiap perencanaan tentu membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak karena masih banyak kekurangannya, terutama pada saat implementasi serta operasional dilapangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dan mudah – mudahan dapat di akomodasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun berikutnya. Kerjasama dan sinergitas adalah kunci utama dalam suksesnya suatu organisasi.



LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PURWAKARTA
TAHUN : 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dibidangnya	Meningkatnya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidang LH	Jumlah pejabat fungsional (PPLHD, PPNS, & Analis Kimia) & aparatur bersertifikat	15 Orang Pejabat Diklat PIN, 8 Orang Belum Mengikuti Diklat PIN	16 Orang Pejabat Diklat PIN, 7 Orang Belum Mengikuti Diklat PIN	16 Orang Pejabat Diklat PIN, 7 Orang Belum Mengikuti Diklat PIN
2	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	Jenis layanan pengujian lingkungan hidup yang terakreditasi	6 Parameter matrik air permukaan, 5 parameter matrik air limbah	10 Parameter matrik air permukaan dan matrik air limbah	13 Parameter matrik air permukaan dan 10 parameter matrik air limbah
			Jenis sertifikat pengujian yang dimiliki aparat	2 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat
			Sistem manajemen pengujian yang terbentuk (Jenis)	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis
3.	Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah & lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati	Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
			Basis data lingkungan hidup yang operasional (perangkat lunak)	2 Perangkat	2 Perangkat	-
			Jumlah titik sumur resapan (titik)	-	-	-

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah titik biopori (titik)	20 Titik	20 Titik	20 Titik
		Meningkatkan pengamanan sumber mata air	Prosentase mata air yang diamankan (titik)	5 Titik	5 Titik	5 Titik
4.	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup	Sistem informasi perizinan lingkungan hidup (perangkat lunak yang operasional)	-	-	Aplikasi berbasis web sistem informasi dokumen lingkungan hidup
			SOP Perizinan lingkungan hidup	SOP Tata Cara Penilaian Amdal, Pemeriksaan Dokumen UKL – UPL an Persetujuan Lingkungan	SOP Tata Cara Penilaian Amdal, Pemeriksaan Dokumen UKL – UPL an Persetujuan Lingkungan	SOP Tata Cara Penilaian Amdal, Pemeriksaan Dokumen UKL – UPL dan Persetujuan Lingkungan
			Aparat bersertifikat amdal	7 Orang	7 Orang	7 Orang
			Jumlah sekolah yang dibina (Prog. Adiwiyata)	-	-	-
5.	Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	Jumlah titik pantau kualitas air (titik)	6 Titik	6 Titik	6 Titik
			Jumlah titik pantau kualitas udara (titik)	3 Titik	3 Titik	3 Titik
			Jumlah titik pantau kualitas tanah (titik)	-	-	-
6.	Penegakkan hukum Lingkungan.	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam	Dokumen evaluasi dari pengaduan atau pengawasan Bersama sanksi administratif	11 Sanksi Administratif perusahaan di Kabupaten Purwakarta	11 Sanksi Administratif perusahaan di Kabupaten Purwakarta	11 Sanksi Administratif perusahaan di Kabupaten Purwakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
		pengelolaan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku				
7.	Verifikasi pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan pengaduan	Dokumen pengelolaan pengaduan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
8.	Tersedianya Pakaian Lapangan Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH menggunakan seragam lapangan yang sama	Tersedianya Pakaian Lapangan Petugas Lapangan di Bidang Pengelolaan Sampah	450 Stel	450 Stel	450 Stel
9.	Terpeliharanya Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang secara rutin/berkala	Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang dapat beroperasi dengan baik	Terpeliharanya 8 unit Arm Roll, 26 unit Dump Truck, 1 unit Compactor fuso, 21 unit pick up	Terpeliharanya 8 unit Arm Roll, 26 unit Dump Truck, 1 unit Compactor fuso, 21 unit pick up	Terpeliharanya 8 unit Arm Roll, 26 unit Dump Truck, 1 unit Compactor fuso, 21 unit pick up	Terpeliharanya 9 unit Arm Roll, 27 unit Dump Truck, 1 unit Compactor fuso, 31 unit pick up, 2 unit engkel, 2 unit tangki tinja, 1 unit tangki tinja kecil, 2 unit mobil toilet
10.	Terpenuhinya kebutuhan ban dan aki Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang	Terpenuhinya kebutuhan ban dan aki Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang	Terpenuhinya kebutuhan ban 5 pcs untuk roda 4, 7 pcs untuk roda 6 dan 2 pcs aki untuk roda 6 dan 1 pc untuk roda 4	Terpenuhinya kebutuhan ban 5 pcs untuk roda 4, 7 pcs untuk roda 6 dan 2 pcs aki untuk roda 6 dan 1 pc untuk roda 4	Terpenuhinya kebutuhan ban 5 pcs untuk roda 4, 7 pcs untuk roda 6 dan 2 pcs aki untuk roda 6 dan 1 pc untuk roda 4	Terpenuhinya kebutuhan ban 5 set untuk roda 4, 7 set untuk roda 6 dan 2 pcs aki untuk roda 6 dan 1 pc untuk roda 4
11.	Tersedianya ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah	Terpenuhinya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH minimal 2x dalam 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH minimal 2x	Terpenuhinya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH minimal

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	dan Peyapuan DLH	Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH minimal 2x dalam 1 tahun		dalam 1 tahun	2x dalam 1 tahun
12.	Tersedianya peralatan teknis untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	Terpenuhinya peralatan teknis untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	1 paket peralatan teknis	1 paket peralatan teknis	1 paket peralatan teknis	1 paket peralatan teknis
13.	Tersedianya Mesin Potong Rumput	Terpenuhinya Mesin Potong Rumput	9 unit	9 unit	9 unit	7 unit
14.	Tersedianya 1 unit Kendaraan Angkutan Persampahan jenis compactor	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketaatan Perusahaan/Industri Terhadap Regulasi/Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25 Perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan
16.	Verifikasi Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Dan Limbah B3	Meningkatnya jumlah perusahaan industri yang memiliki izin dalam pengelolaan Lingkungan	Dokumen Persetujuan Teknis	40 Perusahaan	40 Perusahaan	40 Perusahaan
17.	Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perusahaan Yang Taat Terhadap Regulasi Pengelolaan	Dokumen Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	20 Perusahaan	20 Perusahaan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Lingkungan Hidup				
18.	Pemantauan Kualitas Air Permukaan Sungai Cilamaya	Terpantaunya kualitas data pemantauan kualitas air sungai dan Kualitas Udara	Jumlah titik pantau kualitas air (titik)	6 Titik	6 Titik	6 Titik
			Jumlah titik pantau kualitas udara (titik)	3 Titik	3 Titik	3 Titik
19.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Sungai Citarum	Jumlah Sungai	-	2 Sungai	2 Sungai



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023